

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM**  
**SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Johanes Kwartanto Hariadi**  
**Jabatan : Plt. Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim**

selanjutnya disebut pihak pertama


**Nama : Danang Wijayanto**  
**Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**



**Danang Wijayanto**  
NIP 19620402 198203 1 001

Jakarta, 29 Agustus 2016

**Pihak Pertama,**



**Johanes Kwartanto Hariadi**  
NRP 59121311



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

**BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terselenggaranya proses seleksi calon hakim agung dan calon hakim adhoc di Mahkamah Agung.	1.	Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan seleksi calon hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung.	3 laporan
2.	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas hakim.	1.	Jumlah hakim yang mengikuti pelatihan KEPPH berkelanjutan.	192 orang
		2.	Jumlah laporan pengukuran indeks keberhasilan peningkatan kapasitas hakim (PKH).	1 laporan
3.	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kesejahteraan hakim.	1.	Jumlah rekomendasi pemenuhan jaminan keamanan dan kesehatan.	1 rekomendasi
4.	Terselenggaranya kegiatan advokasi hakim.	1.	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan advokasi, pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang perseorangan/badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.	1 rekomendasi
5.	Terselenggaranya <i>judicial education</i> terkait dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.	1.	Jumlah laporan penyelenggaraan <i>judicial education</i> terkait dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.	13 laporan

**Kegiatan:**

**Anggaran:**

**Seleksi Hakim Agung, Hakim Adhoc di  
Mahkamah Agung, Advokasi dan  
Peningkatan Kapasitas Hakim.**

**Rp13.813.064.000,00.**


**Jakarta, 29 Agustus 2016**

**Sekretaris Jenderal,**

**Plt. Kepala Biro Rekrutmen,  
Advokasi dan Peningkatan Kapasitas  
Hakim,**



**Danang Wijayanto  
NIP 19620402 198203 1 001**



**Johanes Kwartanto Hariadi  
NRP 50121311**



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Onni Rosleini**  
**Jabatan : Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Danang Wijayanto**  
**Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Jakarta, 29 Agustus 2016**

**Pihak Kedua,**

**Danang Wijayanto**  
**NIP 19620402 198203 1 001**

**Pihak Pertama,**

**Onni Rosleini**  
**NIP 19631107 198903 2 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	
	Penyelesaian laporan masyarakat terhadap hakim yang diduga melanggar KEPPH sampai dengan keluarnya keputusan.	1.	Jumlah dokumen hasil sidang atas penanganan laporan masyarakat.	120 laporan
2.		Jumlah dokumen laporan verifikasi yang dapat dilakukan registrasi dan ditindaklanjuti penanganannya.	400 dokumen	
3.		Jumlah keputusan sidang MKH yang diusulkan oleh KY.	6 rekomendasi	
4.		Jumlah laporan pemantauan hasil persidangan.	50 laporan	

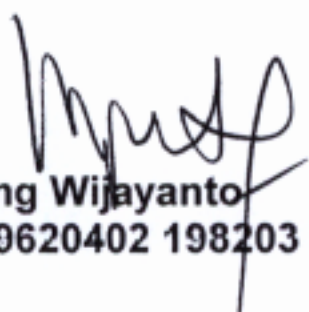
**Kegiatan:**  
Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim

**Anggaran:**  
Rp12.565.561.000,00.

Jakarta, 29 Agustus 2016

Sekretaris Jenderal,

Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim,

  
Danang Wijayanto  
NIP 19620402 198203 1 001

  
Onni Rosleini  
NIP 19631107 198903 2 001



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BIRO INVESTIGASI  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Johanes Kwartanto Hariadi**  
**Jabatan : Kepala Biro Investigasi**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Danang Wijayanto**  
**Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

  
**Danang Wijayanto**  
**NIP 19620402 198203 1 001**

**Jakarta, 29 Agustus 2016**

**Pihak Pertama,**

  
**Johanes Kwartanto Hariadi**  
**NRP 59121311**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BIRO INVESTIGASI


No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Penyelenggaraan penelusuran rekam jejak hakim dan calon hakim.	Jumlah laporan rekam jejak hakim dan calon hakim.	65 laporan
2.	Penyelenggaraan pendalaman kasus atas dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim.	Jumlah laporan investigasi pendalaman kasus.	190 laporan

Kegiatan:

Anggaran:


Penyelenggaraan investigasi hakim dan calon hakim. Rp5.764.074.000,00.

Sekretaris Jenderal,

  
Danang Wijayanto  
NIP 19620402 198203 1 001

Jakarta, 29 Agustus 2016

Kepala Biro Investigasi,

  
Johanes Kwartanto Hariadi  
NRP 59121311



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Ronny DolfinusTulak**

**Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Danang Wijayanto**

**Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Jakarta, 29 Agustus 2016**

**Pihak Kedua,**

  
**Danang Wijayanto**  
NIP 19620402 198203 1 001

**Pihak Pertama,**

  
**Ronny DolfinusTulak**  
NIP 19590702 198703 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi.	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan.	15 dokumen
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan yang diselesaikan.	11 dokumen
2.	Tersusunnya produk hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Jumlah produk hukum yang tersusun sesuai tugas dan fungsi organisasi.	48 dokumen
		Jumlah dokumen organisasi dan tata laksana yang tersusun sesuai tugas dan fungsi organisasi	8 dokumen
3.	Terselenggaranya kepatuhan internal.	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan kepatuhan internal.	16 laporan

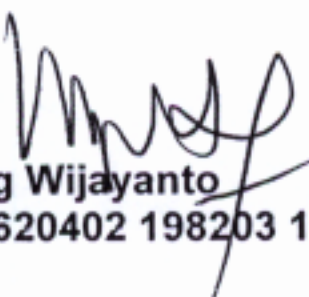
Kegiatan:

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan,  
Hukum dan Kepatuhan Internal

Anggaran:

Rp8.463.832.000,00.

Sekretaris Jenderal,

  
Danang Wijayanto  
NIP 19620402 198203 1 001

Jakarta, 29 Agustus 2016

Kepala Biro Perencanaan dan  
Kepatuhan Internal,

  
Ronny Dolfinus Tulak  
NIP 19590702 198703 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**BIRO UMUM**  
**SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Roejito**  
**Jabatan : Plt. Kepala Biro Umum**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Danang Wijayanto**  
**Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Agustus 2016

**Pihak Kedua,**

**Danang Wijayanto**  
NIP 19620402 198203 1 001

**Pihak Pertama,**

**Roejito**  
NIP 19590921 198203 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**BIRO UMUM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan keuangan.	1. Jumlah laporan administrasi dan pengelolaan keuangan.	12 laporan
2.	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan keprotokolan.	1. Jumlah dokumen pengelolaan dan pengembangan SDM.	15 dokumen
		2. Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha, kearsipan dan keprotokolan.	20 laporan
3.	Terlaksananya kegiatan layanan perlengkapan dan rumah tangga.	1. Jumlah laporan penyelenggaraan operasional perkantoran.	43 laporan
		2. Jumlah cetakan buku dan berbagai publikasi informasi di bidang yudisial.	56000 eksemplar
		3. Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan.	267 unit.
4.	Terlaksananya pengelolaan penghubung, kegiatan kerjasama dan hubungan antar lembaga.	1. Jumlah laporan penyelenggaraan pengembangan dan peningkatan kinerja penghubung dalam pelaksanaan "access to justice" di wilayah penghubung.	36 laporan
		2. Jumlah dokumen kerjasama yang dibuat KY dengan stakeholder.	7 dokumen
		3. Jumlah laporan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring.	2 laporan
5.	Layanan perkantoran.	1. Layanan perkantoran.	12 bulan.

**Kegiatan:**

1. Penyelenggaraan dan pengelolaan penghubung, kegiatan kerjasama, keuangan, perlengkapan rumah tangga, tata usaha, dan pengembangan SDM di lingkungan Komisi Yudisial.

**Anggaran:**

Rp62.869.817.000,00.

Jakarta, 29 Agustus 2016

**Sekretaris Jenderal,**



**Danang Wijayanto**  
NIP 19620402 198203 1 001

**Plt. Kepala Biro Umum,**



**Roejito**  
NIP 19590921 198203 1 004